

BAB 2

Kondisi Exsisting Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas merupakan wilayah yang berfungsi dan berperan cukup strategis dalam lingkup Wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Bagian Barat yang berfungsi sebagai lumbung pangan, pengembangan sektor perkebunan, pengembangan sektor energi dan sebagai daerah penyangga (*buffer*) Provinsi Sumatera Selatan karena di wilayah ini terdapat kawasan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Di masa datang, wilayah ini diharapkan mampu berperan sebagai penggerak perekonomian Sumatera Selatan yang berbasis sektor pertanian (Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan serta Kehutanan), Pertambangan dan Penggalian.

2.1. Letak Geografis

Luas Wilayah Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan adalah 1.236.582,66 ha. Secara geografis Kabupaten Musi Rawas berada di Kawasan bagian barat Provinsi Sumatera Selatan, tempat bertemunya hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Kabupaten Musi Rawas terletak pada posisi 2°20'00" - 3°38'00"LS dan 102°07'00" - 103°40'10" BT. Letak Kabupaten Musi Rawas sangat strategis karena dilalui jalur lintas tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan Bakaheuni di Lampung dan Banda Aceh, serta jalan lintas antar Provinsi yang menghubungkan Kota Palembang dengan Bengkulu, baik melalui Sekayu maupun Lahat. Secara administratif Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 17 kecamatan, 19 kelurahan, 242 desa. Batas – batas Wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Provinsi Jambi**
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **Kabupaten Lahat**
- Sebelah Barat berbatasan dengan **Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuklinggau**
- Sebelah Timur berbatasan dengan **Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim**

Kondisi geografis dan batas administratif di atas menunjukkan bahwa secara sosial – ekonomis Kabupaten Musi Rawas berada pada posisi strategis untuk jalur perdagangan, sehingga berpotensi untuk tumbuhnya perekonomian melalui pengembangan pusat perdagangan yang dapat mengakses kegiatan perdagangan kawasan barat Provinsi Sumatera Selatan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api.

2.2 Fisik dan Sumberdaya Alam

Secara umum kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas mempunyai topografi wilayah yang bergelombang. Dengan ketinggian berkisar 25-1000 meter di atas permukaan laut (dpl). Luas wilayah yang dominan adalah daerah potensial untuk pertanian yaitu seluas lebih kurang 948.135,6 ha. Selebihnya berupa tanah perbukitan yang mempunyai kemiringan sangat curam yang sebagian besarnya berupa Bukit Barisan yang memanjang dari Utara sampai Selatan, khususnya di bagian Barat daerah ini yang termasuk kedalam Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang membentang luas ke dalam empat Provinsi. Keadaan ini mengindikasikan adanya keterbatasan fisik wilayah dalam rangka pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang memerlukan penanganan secara hati-hati untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kabupaten Musi Rawas mempunyai potensi kekayaan alam yang beragam. Selain potensi perkebunan dan pertanian, Kabupaten Musi Rawas memiliki potensi bahan tambang dan galian. Di Kawasan Kecamatan Rupit dan Rawas Ulu terkandung logam mulia yang diperkirakan cadangan biji emasnya sekitar satu juta ton dengan kadar emas 1,00 - 3,65 gram/ton dan biji perak sebesar 7,5 juta ton dengan kadar 41 gram per ton. Selain logam mulia, terdapat juga minyak bumi, batu bara, biji besi, timah hitam dan seng. Sedangkan bahan galian golongan C yang potensial adalah marmer, fosfat, batu gamping, andesit dan pasir.

2.1.1 Topografi

Kabupaten Musi Rawas jika dilihat secara keseluruhan keadaan fisik topografinya merupakan wilayah bergelombang dengan ketinggian antara 25 m dpl sampai dengan 1000 m dpl. Wilayah yang berada pada ketinggian 25 - 100 meter di atas permukaan laut merupakan wilayah yang terluas, yaitu sebesar 650.901 ha, berlokasi di bagian tengah dan timur Kabupaten Musi Rawas (Tabel 2.1)

Tabel 2.1.
Luas Tanah berdasarkan Ketinggian Tempat

No.	Ketinggian dpl (m)	Luas (ha)	Lokasi
1.	25 - 100	650.901	Bagian Tengah & Timur
2.	100 - 500	296.234	Bagian Tengah
3.	500 - 1000	144.998	Bagian Barat
4.	> 1000	144.449	Bagian Barat

Kemiringan lahan bervariasi, yaitu antara 0 - > 40 %, dan yang terluas adalah wilayah dengan kemiringan lahan 2 – 15 %, yaitu seluas 484.197 ha yang umumnya terdapat di bagian Selatan. Kemudian diikuti wilayah dengan kemiringan lahan 0 – 2 %, yaitu seluas 462.938,6 ha yang terdapat di bagian Utara dan Selatan. Untuk lebih jelas, luas tanah berdasarkan kemiringan lahan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Luas Tanah Berdasarkan Kemiringan Lahan

No.	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Lokasi
1.	0 – 2	462.938,6	Umumnya Bagian Selatan
2.	2 – 15	484.197	Bagian Utara dan Selatan
3.	15 – 40	144.998	Umumnya Bagian Barat
4.	> 40	144.449	Umumnya Bagian Barat

2.1.2 Klimatologi

Kabupaten Musi Rawas memiliki iklim tropis basah, dengan kelembaban udara 87,0 % dan rata-rata penyinaran matahari sebesar 61,9 %. Temperatur maksimum 32,9 °C dan temperatur minimum 19,6 °C. Sebagai daerah tropis basah, rata-rata curah hujan di Kabupaten Musi Rawas cukup tinggi, yaitu 2.285 per tahun dan rata-rata hari hujan 116 hari hujan per tahun. Dengan bulan kering hanya empat bulan (Juni, Juli, Agustus dan september), maka wilayah ini termasuk dalam tipe curah hujan B (sangat basah). Rata-rata curah hujan dan hari hujan disajikan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3.
Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Per Tahun di Kabupaten Musi Rawas

Bulan	Jumlah Curah Hujan 1988 - 1997 (mm)	Rata-rata Curah Hujan (mm/bulan; mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan 1988 - 1997 (hh)	Rata-rata Hari Hujan (hh/bulan;hh /tahun)
1. Januari	2.568	256,8	138	13,8
2. Februari	2.024	202,4	108	10,8
3. Maret	2.857	285,7	132	13,2
4. April	2.287	228,7	126	12,6
5. Mei	1.786	178,6	99	9,9
6. Juni	939	93,9	61	6,1
7. Juli	1.161	116,1	64	6,4
8. Agustus	1.099	109,9	71	7,1
9. September	1.213	121,3	72	7,2
10. Oktober	1.742	174,2	104	10,4
11. November	2.629	262,9	136	13,6
12. Desember	2.545	254,5	138	13,8
Jumlah	22.850	2.285,0	1.161	116,1

Sumber: Diolah dari Data Rekapitulasi Curah Hujan 1988 – 1997. Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas

2.1.3 Hidrologi

Kondisi hidrologi atau tata air pada umumnya terdiri dari sungai-sungai besar yang sebagian besar berasal dari Bukit Barisan, dan sebagian mampu dilayari. Sungai-sungai tersebut antara lain adalah: Sungai Musi, Sungai Rawas, Sungai Rupit, Sungai Kelingi, Sungai Megang, Sungai Lakitan, Sungai Lemutas, Sungai Semangus dan Sungai Gegas.

Wilayah rawa dan danau di Kabupaten Musi Rawas merupakan areal potensial pengembangan perikanan dan pengairan. Kondisi air tanah berupa air permukaan digunakan penduduk untuk keperluan mandi dan cuci, sedangkan air tanah dangkal digunakan penduduk untuk keperluan lainnya.

2.1.4 Geologi

Jenis tanah dapat dibedakan ke dalam tujuh jenis. Tanah podsolik merupakan jenis tanah terluas (37,72 %), menyebar di Kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Muara Lakitan dan Jayaloka. Struktur geologi sebagian besar didominasi oleh formasi Palembang dan sebagian lagi oleh formasi Rawas. pH tanah di Kabupaten Musi Rawas berkisar antara 4,5 – 6,0.

Kedalaman efektif tanah dapat dibedakan ke dalam empat kelompok, yaitu lebih dari 90 cm, 90 cm, 60 cm, dan 30 cm, sedangkan tekstur tanah (komposisi fraksi pasir, debu, dan liat) juga terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu sangat halus, halus, sedang, dan kasar. Untuk lebih jelasnya dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rincian Jenis Tanah di Kabupaten Musi Rawas

No.	Jenis Tanah	Persentase	Lokasi/peruntukan
1.	Aluvial	8,05	41,18 % di antaranya di Kecamatan Muara Kelingi. Sesuai untuk padi sawah
2.	Assosiasi Gleihumus	7,17	39,72 % di antaranya di Kecamatan Rupit. Sesuai untuk padi sawah
3.	Litosol	0,77	Digunakan untuk tanaman keras, rumput dan ternak
4.	Asosiasi Latisol	0,77	55,89 % di antaranya di Kecamatan BKL Ulu Terawas dan Rupit
5.	Regosol	0,77	55,89 % di antaranya di Kecamatan Muara Beliti dan 13,34 % di Kecamatan Rawas Ulu. Untuk padi sawah, palawija dan tanaman keras
6.	Podsolik	37,72	Sebagian besar terdapat di Kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Muara Lakitan dan Kecamatan Jayaloka. Untuk padi sawah, usahatani lahan kering dan karet.
7.	Asosiasi Podsolik	29,59	Hanya terdapat di Kecamatan Muara Lakitan dan Rawas Ilir
8.	Kompleks Podsolik	15,16	Hanya terdapat di Kecamatan Rawas Ulu

Secara umum kemampuan tanah di Kabupaten Musi Rawas didominasi oleh jenis tanah dengan kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, dengan tekstur tanah halus dan tidak ada erosi dengan luas lahan sebesar 1.061.621,66 ha atau 85,85 % dari seluruh luas wilayah

Kabupaten Musi Rawas. Sementara lahan yang memiliki kemungkinan erosi sebesar 44.418 ha atau sebesar 3,59 %. Berdasarkan kondisi yang ada dapat disimpulkan bahwa kemampuan lahan di Kabupaten Musi Rawas berada dalam keadaan yang baik untuk mendukung kegiatan pengembangan.

2.1.5 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan didominasi pertanian sawah dan ladang, perkebunan, dan hutan. secara kuantitatif penggunaan lahan sebagian besar digunakan untuk perkebunan karet, yaitu seluas 426.440,535 ha (34,48 %) dan berupa hutan seluas 386.674,402 ha (31,26 %). Sementara untuk kegiatan permukiman penggunaan lahannya hanya sebesar 0,89% dari luas total wilayah. Artinya, daerah ini masih mempunyai peluang untuk pengembangan. Selanjutnya dengan luasnya kawasan hutan yang merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) memungkinkan daerah ini untuk meningkatkan pemafaatan hutan non kayu seperti untuk kegiatan *Ecotourism* (Ekowisata) Penelitian, Pendidikan dan pemafaatan keunikan, keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya. Untuk lebih jelasnya program penggunaan lahan di Kabupaten Musi Rawas disajikan pada Tabel 2.5. Untuk lebih memperjelas lagi persentase penggunaan lahan di Kabupaten Musi Rawas secara grafis disajikan pada Gambar 2.1.

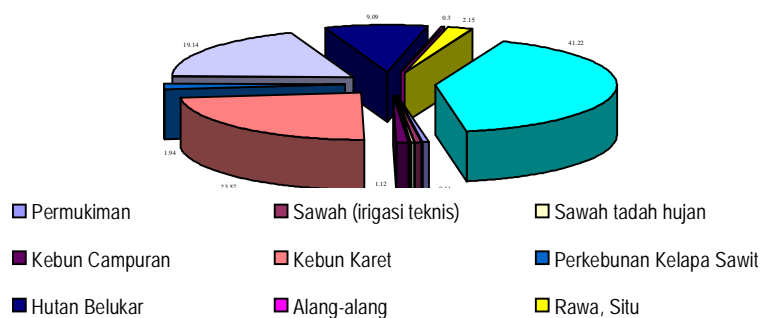
Gambaran umum keadaan fisik sumberdaya alam di Kabupaten Musi Rawas di atas menunjukkan bahwa daerah ini masih cukup potensial untuk dikembangkan untuk pengembangan perekonomian berbasis agraris. Dengan iklim tropis basah yang lembab dan banyaknya sungai-sungai besar yang berhulu di TNKS yang memungkinkan dibangun irigasi skala besar, maka wilayah ini cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sentra produksi agribisnis dan agroindustri perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta lumbung pangan dan lumbung energi.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003

Penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)	Persentase
1. Permukiman	5.920,000	0,48
2. Sawah Irigasi Teknis	15.494,000	1,25
3. Sawah Tadah Hujan	18.144,000	1,46
4. Tegalan	2.873,000	0,23
5. Ladang	56.574,000	4,57
6. Kebun Campuran	38.532,000	3,11
7. Kebun Kopi Rakyat	10.012,000	0,80
8. Kebun Karet Rakyat	426.440,535	34,48
9. Kebun Kelapa Rakyat	4.839,000	0,39
10. Kebun Karet Lainnya	310,000	0,03
11. Perkebunan Besar Karert	200,000	0,02
12. Perkebunan Besar Kelapa Sawit	63.780,000	5,16
13. Perkebunan Besar Kelapa Sawit (Plasma)	42.807,000	3,46
14. Hutan Lebat	386.674,402	321,26
15. Hutan Belukar	73.744,625	5,96
16. Hutan Sejenis	60.000,000	4,85
17. S e m a k	3.431,750	0,27
18. Alang – alang	60.000,000	0,22
19. Galian Tambang	3.431,750	0,05
20. Rawa, SITU	2,691	1,22
21. Tambak, Tabat	15.093,348	0,16
22. Lain-lain / LC	1,963	0,57
J u m l a h	1.236.582,660	100,00

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas 2000

Gambar 2.1
Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003



2.3 Sumberdaya Manusia

2.3.1. Sumberdaya Aparatur

Secara kuantitas sumberdaya aparatur di Kabupaten Musi Rawas sudah cukup baik, walaupun jumlah tersebut belum begitu mendukung untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang persebarannya begitu luas. Namun demikian, secara kualitas dan tingkat kompetensi masih relatif kurang.

Jumlah PNS di Kabupaten Musi Rawas 6.259 Orang, terdiri atas Guru 2.925 Orang, Medis/Para Medis 644 Orang, dan PNS Lainnya 2.690 Orang.

Dilihat dari persebaran golongan ternyata jumlah pegawaiian cukup baik. Akan tetapi, jika dilihat dari keprofesian guru dan medis/paramedis, jumlah tersebut masih relatif kurang. Demikian juga jika dilihat dari tingkat pendidikan dan kompetensi.

2.3.2. Sumberdaya Masyarakat

Indikator kualitas Sumberdaya masyarakat dapat diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana. Indikator pendidikan yang digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), sedangkan indikator kesehatan yang digunakan adalah Usia Harapan Hidup, kasus penyakit menular, partisipasi dalam Keluarga Berencana. Indikator lain yang digunakan dalam mengukur kualitas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator tingkat pendidikan menunjukkan bahwa APK SD/MI 96,50 %, APM SD/MI 84,17 %, APK SLTP 86,00 %, APM SLTP 75,00 %, APK SLTA 57,00 %, dan APM SLTA 37 %. Indikasi ini menunjukkan bahwa masih ada anak usia sekolah yang belum bersekolah, dan bahkan makin tinggi jenjang sekolah tingkat partisipasi murni makin kecil. Artinya bahwa terjadi peningkatan jumlah anak putus sekolah untuk SLTP dan SLTA.

Ditinjau dari derajat kesehatan masih relatif rendah, yang tercermin dari masih tingginya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan masih tingginya kasus kurang gizi pada BALITA. Selain itu rendahnya derajat kesehatan juga dicerminkan masih tingginya penderita penyakit menular seperti TB Paru dan malaria, penyakit tidak menular seperti penyakit jantung/pembulu darah, diare, kencing manis (*diabetusmellitus*), dan kanker.

Selanjutnya, rendahnya kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hak-hak reproduksi, rendahnya usia perkawinan pertama, rendahnya partisipasi kaum laki-laki dalam ber-KB, dan lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan program KB juga menjadi cerminan rendahnya derajat kesehatan di daerah ini. Demikian juga halnya dengan rendahnya kualitas pemuda dan partisipasi kaum perempuan terhadap pembangunan.

Uraian mengenai sumberdaya masyarakat di atas menunjukkan bahwa kualitas SDM di daerah ini masih rendah. Apalagi kalau dilihat dari *Human Development Indeks (HDI)*/Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan *Human Development Report 2004*, ternyata pada Tahun 2002, angka IPM Kabupaten Musi Rawas menduduki urutan ke 289 dari 340 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

2.4 Perekonomian

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah adalah hal-hal yang berkaitan dengan indikator makro ekonomi, yaitu struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan tingkat inflasi; dan indikator yang berkaitan dengan mikro ekonomi, seperti tingkat pendapatan per kapita dan tingkat produksi. Selain itu juga digunakan indikator-indikator ekonomi wilayah di antaranya keuangan daerah, ketimpangan ekonomi wilayah dan keterkaitan ekonomi wilayah (*regional economic linkages*).

2.4.1. Struktur Ekonomi

Secara garis besar struktur ekonomi diklasifikasikan ke dalam tiga sektor, yaitu: sektor primer, sekunder dan sektor tersier. Struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas masih didominasi sektor primer, yaitu pertambangan dan pertanian, kemudian diikuti sektor sekunder dan sektor tersier. Secara rinci struktur ekonomi dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga (ADH) berlaku 2001 – 2004 masih didominasi sektor pertambangan (antara 42,84 % - 45,03 %) dan pertanian (35,00 % - 41,27 %), sedangkan kontribusi sektor-sektor lain masih di bawah 6 %. Dari total kontribusi sektor pertambangan dan penggalan, 40,45 % - 42,39 % berasal dari pertambangan Migas dan sisanya berasal dari penggalan, sedangkan dari total kontribusi sektor pertanian, 19,25 % - 23,17 % berasal dari sektor perkebunan, 5,43 % - 10,00 % berasal dari sektor tanaman

bahan makanan, dan sisanya secara berurutan berasal dari kontribusi sektor perikanan, peternakan dan kehutanan.

Dari uraian di atas mengindikasikan bahwa, sebagai daerah yang berbasis agraris dan penghasil pertambangan dan penggalian, maka daerah ini masih belum mendapatkan nilai tambah dari kedua sektor tersebut. Hal ini dicerminkan dengan masih rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan, perdagangan dan listrik terhadap PDRB. Pada hal kedua sektor ini merupakan kekuatan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah. Dengan demikian secara logis memperkuat bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah, yang dapat dijadikan *leading sector* adalah pengembangan agribisnis/agroindustri, terutama industri pengolahan hasil dan perdagang, pengembangan jasa-jasa transportasi/distribusi dan pengembangan pertambangan untuk sumber energi sebagai upaya mendukung Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi.

Hal lain yang harus dipertimbangkan daerah ini adalah masih dominannya Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam struktur ekonomi. Padahal Sumberdaya Alam (SDA) sektor ini merupakan SDA yang tidak dapat diperbaharui dan kondisi cadangannya pun semakin menipis. Sehingga ke depan, selain harus ada upaya mengubah struktur ekonomi yang berbasis SDA yang dapat diperbaharui, juga ada upaya penggalian sumber energi yang dapat diperbaharui, seperti *Bioenergi*.

Tabel 2.6.
PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2001 – 2004

No	Sektor	2001		2002		2003		2004	
		Rp. juta	(%)	Rp. Juta	(%)	Rp. juta	%	Rp. Juta	%
1.	Pertanian	904.771	35,00	1.013.042	36,85	1.145.594	38,86	1.286.517	41,27
	- Bahan Makanan	225.300	8,43	257.164	8,83	298.145	9,32	345.246	10,00
	- Perkebunan	496.081	19,25	559.146	20,30	623.434	21,55	694.136	23,17
	- Peternakan	65.496	2,53	75.134	2,80	86.413	2,94	95.654	3,03
	- Kehutanan	43.025	1,82	31.455	1,77	31.466	1,82	30.164	1,77
	- Perikanan	74.869	2,98	90.143	3,15	106.136	3,22	121.317	3,30
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.068.921	42,84	1.120.810	42,98	1.234.765	43,97	1.381.424	45,03
	- Migas	1.010.146	40,48	1.058.456	40,56	1.164.741	41,42	1.295.649	42,39
	- Penggalian	58.775	2,36	62.354	2,42	70.024	2,55	85.775	2,64
3.	Industri Pengolahan (tanpa migas)	190.936	7,46	226.513	7,69	264.570	8,08	315.619	8,64
4.	Listrik dan Air Bersih								
	- Listrik	1.759	0,06	1.973	0,07	1.290	0,07	2.443	0,07
	- Air Bersih	1.620		1.818		2.021		2.258	
		139		155		169		185	
5.	Bangunan	87.590	3,48	102.468	3,74	119.143	3,91	138.915	4,00
6.	Perdagangan & Restoran								
	- Perdagangan	107.534	4,08	123.130	4,29	141.255	4,53	164.232	4,71
	- Restoran	101.969	3,87	116.874	4,06	134.310	4,29	156.587	4,47
		5.565	0,21	6.256	0,23	6.945	0,24	7.645	0,25
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	8.831	0,35	10.858	0,37	12.604	0,41	14.728	0,44
	- Pengangkutan	7.156	0,29	8.752	0,30	10.171	0,34	11.787	0,36
	- Komunikasi	1.645	0,06	2.106	0,07	2.433	0,07	2.941	0,07
8.	Keuangan, Perse-waan & Jasa Peru-sahaan								
	- Bank	37.740	1,57	41.884	1,64	45.319	1,73	52.964	1,83
	- Non Bank	626	0,02	706	0,03	795	0,03	845	0,03
	- Sewa Bangunan	936	0,04	1.021	0,04	1.135	0,04	1.225	0,04
	- Jasa Persewaan	35.670	1,49	39.541	1,56	42.645	1,64	49.989	1,74
		508	0,02	616	0,01	744	0,02	905	0,02
9.	Jasa-jasa	146.099	5,93	165.617	6,24	182.640	6,56	208.475	6,92
	- Pemerintahan Umum	106.650	4,40	119.247	4,64	128.645	4,90	145.567	5,18
	- Swasta	39.449	1,53	46.663	1,60	54.340	1,67	63.317	1,74
PDRB dengan Migas		2.554.181	0,94	2.806.295	0,98	3.148.080	1,02	3.565.320	1,06
PDRB Tanpa Migas		1.554.035	0,58	1.747.839	0,62	1.983.339	0,65	2.269.671	0,68

Sumber: Diolah dari Musi Rawas dalam Angka, 2005

2.4.2. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Tingkat Inflasi

Indikator peningkatan produksi dapat diamati dari pertumbuhan PDRB ADH Konstan, sedangkan kemampuan setiap penduduk dalam menghasilkan barang dan jasa dapat diukur dari pendapatan. Tabel 2.7. menyajikan tingkat pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita.

Tabel 2.7. menunjukkan bahwa tahun 2001 pertumbuhan ekonomi relatif sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,77% akibat pengaruh sektor migas yang pertumbuhannya negatif. Namun

pertumbuhan kembali positif pada tahun 2002, yaitu sebesar 3,10 % dan meningkat kembali menjadi 4,09 % pada tahun 2003. Sedangkan pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas sebesar 4,42%. Sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat bahkan mencapai angka di atas 5 % antara lain adalah sub sektor angkutan (7,25%), sub sektor Komunikasi (6,85%), Sektor Keuangan (5,44), dan Sektor Jasa (5,41). Sektor pertanian sebagai basis ekonomi pada tahun 2004 pertumbuhannya mencapai 6,20 %. Yang merupakan agregat dari beberapa sub sektor yaitu Tanaman Pangan 7,29%, Perkebunan 7,52%, Peternakan 2,83% , Kehutanan - 2,78 % dan Perikanan 2,39 %.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendapatan
Per Kapita Di Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2000 – 2004

No.	Tahun	Laju Pertumbuhan (%)		Pendapatan Per Kapita (Rp.)	
		Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
1.	2000	-	-	5.536.762	3.121.169
2.	2001	0,77	4,46	5.781.075	3.404.193
3.	2002	3,10	5,06	6.197.326	3.761.292
3.	2003	4,09	5,35	6.775.251	4.163.716
4	2004	4,42	5,72	7.478.319	4.647.913

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Musi Rawas, 2004

Tabel 2.7. juga menunjukkan bahwa tingkat pendapatan per kapita dengan migas menunjukkan kecenderungan yang meningkat, demikian juga pendapatan tanpa migas. Namun, yang patut dicermati adalah kesenjangan pendapatan per kapita dengan migas dan tanpa migas yang cenderung menajam. Karena pendapatan per kapita tanpa migas mengindikasikan banyaknya pendapatan yang dinikmati langsung oleh masyarakat, maka kesenjangan tersebut memberi makna adanya dualisme ekonomi dan kesenjangan ekonomi masyarakat dan kesenjangan antar wilayah.

Selanjutnya indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi adalah tingkat inflasi. Tabel 2.8 memberikan gambaran perkembangan tingkat inflasi Tahun 2001 – 2004.

Tabel 2.8. Persentase Tingkat Perubahan Harga-Harga Umum Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2001 – 2004 (Tahun Dasar 1993)

Sektor	2001	2002	2003	2004
1. Pertanian	8,64	6,32	7,25	5,75
2. Pertambangan & Penggalian	4,86	4,50	7,70	9,25
3. Industri Pengolahan	7,62	15,02	11,11	11,62
4. Listrik, Gas & Air Minum	9,63	4,44	5,36	5,08
5. Bangunan	5,91	8,65	11,36	13,93
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	10,82	8,85	8,73	11,70
7. Angkutan & Komunikasi	3,26	16,31	4,56	9,03
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,26	6,03	2,45	10,84
9. Jasa-jasa	3,39	7,72	4,80	8,29
Dengan Migas	6,51	6,57	7,77	8,46
Tanpa Migas	7,62	7,75	7,72	8,24

Secara keseluruhan tingkat perubahan harga-harga umum dikenal juga dengan tingkat inflasi sektoral yang terjadi selama tahun 2004 relatif sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 laju inflasi sebesar 8,24 persen. Laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 72,63 persen yang pada saat itu Indonesia mengalami krisis keuangan (moneter). Namun setelah tahun tersebut maka perekonomian sedikit demi sedikit mengalami perbaikan sehingga tingkat inflasi pada tahun 2001 turun 7,62 persen, dan kecenderungan ini terus berlangsung, sehingga tingkat inflasi tahun 2002 dan 2003 hanya sebesar 7,75 dan 7,72 persen. Akan tetapi, akibat kenaikan BBM akhir-akhir ini, mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, masuknya inflasi ke perde saan dan makin turunnya nilai tukar sektor pertanian.

Untuk mengatasi masalah tersebut menurut Friedman dan Douglas (1998) perlunya memasukkan konsep agropolitan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah yang mempunyai kekayaan dan keragaman sumberdaya hayati. Karena dengan konsep ini ada upaya pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya lokal, kemandirian dan mengatasi dualisme ekonomi perkotaan dan perdesaan.

Temuan Amin (2004) menunjukkan bahwa pengembangan agribisnis dengan berbasis sumberdaya lokal telah dapat mendorong peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja wilayah dan antar wilayah

2.4.3. Produksi Sektoral
2.4.3.1 Sektor Perkebunan

Sebagian besar perkebunan yang diusahakan adalah perkebunan karet dan kelapa sawit. Luas perkebunan karet 219.564 ha sebagian diusahakan oleh rakyat dan perusahaan swasta dengan produksi 136.192,20 Ton/Tahun. Sedangkan kebun kelapa sawit yang telah dicadangkan areal seluas 252.693,20 ha, sampai tahun 2004 telah terealisasi penanaman seluas 91.480,20 ha dikelola oleh 7 perusahaan dengan melibatkan petani melalui Pola Plasma dan Inti. Untuk lebih jelasnya mengenai luas areal dan produksi perkebunan besar dapat dilihat dalam Tabel 2.9

Tabel 2.9
Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Kab. Musi Rawas
Tahun 2003-2004

N o.	Komoditas	Luas Areal (ha)		Produksi (ton)		Produktivitas (ton/ha)	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004
1.	Karet	217.072,	219.564,00	111.847,63	136.912,20	0,515	0,624
2.	Kelapa Sawit	8.100,00	91.480,20	12.350,00	1.403.188,6	1,525	15,339
3.	Kopi	6.041,00	4.727,00	4.107,43	1.842,95	0,680	0,390
4.	Kelapa	4.658,00	3.588,55	2.433,42	2.010,94	0,522	0,560
5.	Kemiri	89,00	54,50	32,34	19,90	0,363	0,365
6.	Kakao	12,50	11,00	7,20	-	0,006	0
7.	Pinang	-	140,00	-	57,90	0	0,414
8.	Kayu Manis	95,00	181,50	7,59	11,25	0,080	0,062

Sumber : *Selayang Pandang Kabupaten Musi Rawas 2003*

Ket : Untuk karet = KKK (Kadar Karet Kering); dan Sawit = TBS (Tandan Buah Segar)

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa produksi karet dan sawit yang merupakan tanaman unggulan menunjukkan peningkatan, dan bahkan pada kelapa sawit peningkatan produksi terjadi sangat signifikan. Lain halnya dengan produktivitas, pada tanaman karet peningkatan produktivitas tidak terlalu signifikan, sehingga perlu ada perbaikan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Berbeda dengan karet, seiring dengan peningkatan umur produksi, peningkatan produktivitas kelapa sawit terjadi sangat signifikan. Akan tetapi, berkaitan dengan kenaikan produktivitas tersebut, terindikasi bahwa kedua komoditas ini masih berpeluang untuk ditingkatkan, baik melalui intensifikasi maupun melalui ekstensifikasi atau rehabilitasi tanaman.

2.4.3.2 Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah lumbung beras di Provinsi Sumatera Selatan dengan potensi sawah beririgasi (Teknis, Setengah Teknis, Sederhana dan irigasi Desa) seluas 61.820 ha. Sedangkan Sawah lebak dan sawah tadah hujan seluas 22.009 ha. Pada tahun 2004 produksi beras tercatat sebanyak 129.322 ton, sedangkan untuk kebutuhan 55.264 ton, berarti mengalami surplus sebesar 74.058 ton beras. Potensi persawahan didukung oleh prasarana irigasi *Water Vang* untuk mengairi sawah di Tugumulyo dan sekitarnya yang dibangun oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1941. Luas tanam padi, palawija, sayuran dan buah-buahan dapat dilihat dalam Tabel 2.10

Tabel 2.10
Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan, Sayuran dan Buah-buahan

No.	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produksi (ton)		Produktivitas (ton/ha)	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004
1.	Padi	54.524	57.805	222.880	228.428	4,09	3,95
	- Padi Sawah	37.810	43.874	187.765	199.324	4,97	4,54
	- Padi Gogo	16.714	13.931	35.115	29.104	2,10	2,10
2.	Palawija						
	- Jagung	1.345	1.432	2.772	3.365	2,06	2,50
	- Kedelai	315	357	418	476	1,33	1,51
	- Kacang Tanah	444	425	538	511	1,21	1,15
	- Kacang Hijau	239	150	188	128	0,79	0,53
	- Ubi Kayu	834	655	8.874	7200	10,64	8,63
	- Ubi Jalar	180	143	1.376	1.189	7,64	6,61
3.	Sayuran	1.117	784	5.305	3.307	4,75	2,96
4.	Buah-buahan	3.980	3.375	43.491	28.993	10,93	7,28

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas, 2004

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa secara umum pada Tahun 2004 terjadi peningkatan luas tanam, produksi dan produktivitas. Namun dari produktivitas komoditas tersebut tergambar bahwa masih terdapat peluang peningkatan produktivitas sesuai dengan potensinya. Selain itu, adanya dukungan sumberdaya alam, daerah ini juga masih punya potensi besar untuk usaha ekstensifikasi pertanian (perluasan areal).

Untuk mendukung peningkatan areal luas tanam, maka akan segera dibangun Daerah Irigasi Air Lakitan/Bendungan Selangit, diharapkan dapat mengaliri persawahan seluas \pm 14.000 ha. Selain itu, adanya aliran sungai besar yang hulunya TNKS memberikan jaminan ketersediaan air bagi pertanian di daerah ini. Karena itu, program pembangunan irigasi skala besar sangat memungkinkan. Sehingga daerah ini dapat dijadikan lumbung pangan nasional.

2.4.3.3. Sektor Peternakan

Komoditas ternak yang dominan adalah ternak sapi, ternak ayam buras, ternak kambing, ternak kerbau, ternak itik dan ternak domba. Jumlah populasi ternak sapi sebanyak 33.249 ekor. Untuk memacu produksi daging, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah usaha penggemukan sapi secara berkelompok. Populasi ayam buras sekitar 938.000 ekor dengan pola pemeliharaan ke spesifikasi usaha antara lain produksi bibit (DOC), telur dan daging. Upaya percepatan produksi adalah dengan melakukan teknologi Inseminasi Buatan (IB) dengan jumlah produksi telur \pm 381.857 butir/hari. Lebih jelasnya mengenai populasi ternak dapat dilihat dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11 menunjukkan bahwa umumnya pada Tahun 2004 terjadi peningkatan populasi ternak. Kondisi ini masih memungkinkan untuk ditingkatkan, karena kalau kita perhatikan perikanan dan pertanian sebagai sumber pakan, dan ketersediaan lahan sangat mendukung pengembangan peternakan.

Tabel 2.11
Populasi Ternak di Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2003-2004

No.	Jenis Ternak	Tahun	
		2003	2004
1.	Sapi	32.292	33.249
2.	Kerbau	24.385	25.282
3.	Kambing	83.562	87.814
4.	Domba	6.977	7.171
5.	Babi	4.879	4.984
6.	Ayam Buras	911.000	938.000
7.	Ayam Petelur	-	-
8.	Ayam Pedaging	59.700	70.900
9.	Itik/Angsa	108.000	113.000

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas 2004

2.4.3.4. Sektor Perikanan

Potensi perikanan terdiri dari sawah 2.026,26 ha, kolam air tenang/kolam air deras 703,30 ha, kolam air deras 495 unit (\pm 1,98 ha), potensi tersebut didukung oleh sarana dan prasarana

berupa Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 3 unit. Rata-rata produksi ikan Mas dan Nila dari kolam air deras sebanyak 2.766.042 Kg/tahun, sedangkan kebutuhan pakan (pelet 434.400Kg/tahun). Pada saat ini sedang dikembangkan jenis ikan unggulan yaitu ikan betutu (*Oxyceotias Marmoratus*). Lebih jelasnya mengenai luas areal dan produksi perikanan di Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat dalam Tabel 2.12

Tabel 2.12
Luas Areal Perikanan dan Produksi Ikan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2004

No.	Jenis Komoditas	Skala Usaha	Produksi
A.	Ikan Konsumsi (ton)		5.058,59
1.	Budidaya		3.654,14
	- Kolam Air Deras	495 unit	1.907,08
	- Kolam Air Tenang	703,30 ha	848,98
	- Sawah	2.026,26ha	809,64
	- Perairan Umum (keramba & J.apung)	0,1453 ha	88,40
2.	Hasil Penangkapan		1.404,45
	- Sungai/Anak sungai	6,431,58ha	1.077,85
	- Rawa/Danau/Waduk	2.804,91ha	326,60
3.	Benih Ikan (ekor)		94.791.000,00
	Unit Pembenuhan Rakyat (UPR)	74,61 ha	93.455.500,00
	Balai Benih Ikan (BBI)	6,40 ha	1.335.500,00

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Musi Rawas, 2004

Potensi perikanan di daerah ini cukup menjanjikan, jika kita lihat kembali potret sumberdaya air di daerah ini. Upaya pengembangan irigasi skala besar, pemanfaatan perairan umum dan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk pengembangan usaha pakan ternak merupakan upaya-upaya yang harus dilaksanakan ke depan untuk mendukung pengembangan usaha perikanan di daerah ini.

2.4.3.5. Sektor Kehutanan

Luas kawasan berupa hutan seluas 631.104 ha. Berdasarkan (Tata Batas & RTRWP) yang terdiri dari :
Kawasan Non Budidaya :

a. Kawasan Konservasi (HAS, CA dan HW dan termasuk TNKS)	= 251.252 ha
b. Hutan Lindung	= 1.842 ha
Kawasan Budidaya :	
a. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	= 26.480 ha
b. Hutan Produksi Tetap (HP)	= 301.458 ha
c. Hutan Produksi Konversi (HPKV)	= 50.072 ha

Dari luas kawasan tersebut, hutan yang masih produksi seluas 177.046 ha dari luas keseluruhan Kabupaten Musi Rawas. Lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan seluas 199.762 ha, sedangkan di luar kawasan hutan seluas 257.909 ha.

Ada beberapa *issue* sentral yang dikaitkan dengan hutan tropis basah, yaitu: *ecolabelling*, *illegal logging* dan penipisan lapisan ozon yang sangat mempengaruhi iklim dan lingkungan bagi negara-negara subtropis. Akan tetapi, ketiga *issue* sentral yang merupakan tantangan dalam usaha pemanfaatan dan pengembangan hutan tropis ini akan mewujudkan menjadi peluang, jika kita melihat kekuatan berupa keragaman sumberdaya hayati yang ada. Adanya TNKS yang merupakan *plasma nutfah* sumberdaya hayati wilayah tropis memberi peluang untuk pengembangan wisata alam

2.4.3.6. Sektor Pertambangan

Kabupaten Musi Rawas memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, meliputi golongan A, golongan B dan golongan C. Golongan A terdiri dari batubara dengan jumlah cadangan ± 1.235 juta Ton, berlokasi di Kecamatan Rawas Ilir, Rawas Ulu dan Muara Lakitan. Kemudian minyak bumi 61.786,6 MSTB, gas bumi 1.122,96 MSTB. Potensi migas ada di Kecamatan Muara Kelingi, Jayaloka, Rawas Ilir, Muara Lakitan dan Karang Dapo. Sedangkan uranium berada di Kecamatan Rawas Ulu.

Untuk golongan B, meliputi emas dan perak berada di Kecamatan Rupit, Karang Jaya dan Rawas Ulu Kemudian untuk biji besi berlokasi di Pulau Kidak, Kecamatan Rawas Ulu dengan jumlah cadangan 275 juta ton. Selanjutnya untuk golongan C terdiri dari marmer (di Pulau Kidak, Kecamatan Rawas Ulu), pospat (Napal Licin), batu gamping (Napal Licin, Kecamatan Rawas Ulu), pasir (Kecamatan Tugumulyo, Rupit dan Rawas Ulu) dan andesit (terdapat di Desa Sukorejo Kecamatan BKL Ulu Terawas, Tugumulyo, Rupit, Rawas Ulu, Muara Kelingi dan Muara Beliti).

Berbagai potensi bahan tambang dan galian di atas, hanya migas dan galian golongan C (pasir) yang telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Potensi bahan tambang dan galian yang lain masih memerlukan kajian lanjut, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah ini. Sebagai contoh, potensi batubara di daerah ini lebih efisien kalau dikembangkan sebagai sumber energi dengan membangun pembangkit listrik di mulut tambang.

2.4.3.7. Sektor Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas dan tidak terpisahkan dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya. Sektor pariwisata mempunyai potensi yang cukup besar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Objek-objek wisata yang ada di Kabupaten ini dapat menarik minat wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, di antaranya adalah:

1. Goa Napalicin & Arung Jeram sungai Rawas Desa Napallicin Kec. Ulu Rawas;
2. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kec. Ulu Rawas, BKL Ulu Terawas, dan Kec. Karang Jaya
3. Cottage Forest Longe Melati III & Goa Alam Desa Napalicin Kec. Ulu Rawas
4. Air Terjun Sunga Kerali, Batu Kuning, Batu Bakul, Goa Bukit Kelun, Goa Siro Gede dan Air Terjun Batu Ampar desa Kuto Tanjung Kec. Ulu Rawas
5. Danau Raya & Suku Kubu desa Sungai Jernih Kec. Rupit
6. Air Terjun Curup, Muara Tiku Kec. Karang Jaya
7. Perkampungan Suku Anak Dalam, Danau Eks Pertambangan BTM, Batu Asam & Goa Harimau desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya
8. Danau Sukahati desa Sukahati Kec. Karang Jaya
9. Wisata Alam Curuq Telon, Air Terjun Ulu Pike desa Sukaraya Kec. Karang Jaya
10. Air Terjun Tinggi, Air Terjun Sungai Talang, Air Terjun sungai Takuyung, Air Terjun Yuk Mimbung dan Air Terjun Ulu sungai Bal desa Pasenan Kec. BKL. Ulu Terawas.
11. Air Terjun Curup Embun dan Air Terjun Gunung Putih
12. Bukit Botak & Bukit Cogong desa Sukakarya
13. Air Terjun Satan , Danau Dam Satan, dan Air Terjun Kou Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti
14. Dam Irigasi Gegas Kec. Jayaloka

15. Dam Irigasi Bendungan Tikip Kec. Purwodadi
16. Sumber Air Panas dan Air Mancur desa Karya Sakti Kec. Muara Kelingi.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih relatif rendah. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa potensi sektor pariwisata belum begitu banyak mendukung PAD Kabupaten Musi Rawas. Dikatakan demikian, karena sektor ini merupakan sektor yang dikelola langsung oleh daerah. Ke depan, dalam rangka memacu kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PAD diperlukan upaya-upaya perbaikan infrastruktur pendukung dan peningkatan intensitas promosi.

2.4.3.8. Sektor Industri

Berdasarkan skala usaha, sektor industri yang berkembang di Kabupaten Musi Rawas sampai dengan tahun 2004 didominasi oleh industri skala mikro. Industri tersebut di antaranya adalah: batu bata, genteng, aneka industri, rotan, aneka anyaman, makanan (tahu, tempe)/minuman, dan konveksi.

Selanjutnya sebagai wilayah agraris, maka agroindustri cukup memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi daerah. Sementara ini, agroindustri hilir seperti pengolahan Kelapa Sawit yang terdapat di Kecamatan Muara Lakitan, Muara Kelingi, Rawas Ilir dan Karang Jaya, masih terbatas pada industri CPO. Demikian juga halnya dengan industri hilir karet yang terdapat di Kecamatan Nibung, Rawas Ulu dan Kecamatan Muara Kelingi, masih terbatas pada industri *crum rubber*. Karena itu, dalam lima tahun ke depan, pengembangan agroindustri harus disertai dengan pemahaman turunan produk (contoh pemanfaatan limbah dan diversifikasi produk). Agroindustri yang berbahan baku lokal lain yang berpotensi dikembangkan daerah ini, di antaranya, industri pakan, pengolahan kelapa untuk pengembangan aneka produk, industri berbahan baku kayu, industri berbahan baku ikan, dan industri berbahan baku hewani.

Produk pertanian sebagai bahan baku agroindustri hilir di atas mempunyai karakteristik pemasaran yang *konsentratif – distributif*. Artinya bahwa untuk mencapai konsumen akhir produk pertanian harus melalui rantai pemasaran yang panjang, karena itu sering berhadapan dengan ekonomi biaya tinggi. Untuk menghindari hal tersebut, perlu disusun berbagai regulasi dan sosialisai peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pengembangan jalur transportasi yang

mudah seperti kereta api, komunikasi dan pembangunan terminal peti kemas.

2.5. Sosial Kependudukan

2.5.1. Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2004 adalah 465.682 jiwa, yang tersebar di 17 kecamatan atau 261 desa/kelurahan. Terdiri dari 234.000 orang penduduk laki-laki dan 231.682 orang penduduk perempuan dan terhimpun ke dalam 116.210 rumah tangga atau Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa rasio antara penduduk laki-laki dan perempuan adalah 101,00. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk laki-laki terdapat 101,00 penduduk laki - laki. Table 2.13. menyajikan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah KK dan kepadatan penduduk.

TABEL 2.13.
JUMLAH PENDUDUK DAN RUMAH TANGGA

No.	Kecamatan	Luas (ha)	∑ desa/ kelurahan	Penduduk (Jiwa)			Kepala Keluarga (KK)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
				Laki-laki	Peremp uan	Jumlah		
1.	BKL Ulu Terawas	51.450,00	21	20.091	20.601	41.502	9.174	80,7
2.	Selangit	80.350,00	11	8.076	8.054	16.130	3.945	20,1
3.	Rupit	71.000,00	13	13.715	14.309	28.024	5.816	39,5
4.	Rawas Ilir	99.950,00	11	11.112	11.236	22.348	5.762	22,4
5.	Ulu Rawas	139.100,00	7	4.869	4.830	9.699	3.126	7,0
6.	Nibung	67.750,00	10	10.321	9.704	20.025	4.298	29,6
7.	Rawas Ulu	31.850,00	13	13.924	14.990	28.914	6.960	90,8
8.	Tugumulyo	6.697,75	17	19.603	19.432	39.035	9.958	582,8
9.	Jayaloka	35.785,00	19	11.436	11.110	22.546	5.203	63,0
10.	Muara Lakitan	201.300,00	20	16.572	15.616	32.188	8.350	16,0
11.	Muara Beliti	48.500,00	18	15.405	15.539	30.944	7.601	63,8
12.	Muara Kelingi	83.250,00	30	26.479	25.672	44.336	11.582	62,6
13.	BTS Ulu	70.600,00	19	10.891	10.710	21.601	7.289	30,6
14.	Megang Sakti	43.750,00	18	22.671	21.665	44.336	11.029	101,3
15.	Karang Jaya	169.500,00	14	13.357	13.359	26.716	7.334	15,8
16.	Karang Dapo	29.950,00	9	7.957	8.146	16.103	5.004	53,8
17.	Purwodadi	5.800,25	11	6.711	6.709	13.420	3.779	231,4
Jumlah		1.236.583,00	261	234.000	231.682	465.682	116.210	37,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, 2005.

Dari Tabel 2.13 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk 37,7 jiwa per km². Ditinjau dari klasifikasi kepadatan penduduk, Kabupaten Musi Rawas tergolong daerah yang berpenduduk tidak padat (Undang-undang Nomor: 56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan

penduduk, yaitu: tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1 – 50 jiwa/ km²; kurang padat antara 51 – 250 jiwa/ km²; cukup padat 251 – 400 jiwa/ km²; dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/ km²). Namun demikian, kalau dilihat persebaran penduduk per kecamatan, maka ternyata Kecamatan Tugumulyo merupakan kecamatan dengan klasifikasi sangat padat, disusul Kecamatan Purwodadi dengan klasifikasi cukup padat dan Kecamatan Megang Sakti dengan klasifikasi kurang padat. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlu ada kebijakan kependudukan berupa transmigrasi lokal dari ketiga kecamatan tersebut, terutama Kecamatan Tugumulyo dan Purwodadi ke daerah potensial dengan penduduk tidak padat.

2.5.2. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio/DR*) dan Ketenagakerjaan

Untuk mengetahui beban ketergantungan, diperlukan pengklasifikasian penduduk menurut umur. Tabel 2.14 menyajikan data penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.14.
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)	Rasio Laki-laki dan Perempuan
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
0 – 14	75.624	74.007	149.631	102,185
15 – 29	64.750	66.826	131.576	96,893
30 – 44	45.948	49.965	95.913	91,960
45 – 59	32.867	30.441	63.308	107,970
≥ 60	14.811	10.443	25.254	141,827
Total	234.000	231.682	465.682	101,000

Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik, 2005. Musi Rawas dalam Angka, 2004

Pada Tabel 2.14 digambarkan bahwa menurut strata umur rasio penduduk laki-laki terbesar adalah pada kelompok umur ≥ 60, yaitu 141,827, dan yang terendah pada kelompok umur 30 tahun – 44 tahun. Ini berarti bahwa usia harapan hidup penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan, yang menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan

kaum laki-laki. Angka rasio penduduk laki-laki dan perempuan tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kematian perempuan tinggi pada usia subur. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi.

Tabel 2.14 juga menunjukkan bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio/DR*), yaitu rasio antara jumlah penduduk yang berumur 0 –14 tahun ditambah jumlah penduduk yang berumur \geq 60 tahun dengan jumlah penduduk yang berusia 15 – 29 tahun dikalikan 100. Hasil perhitungan menunjukkan DR 71,99, yang bermakna setiap penduduk usia produktif harus menanggung 71,99 penduduk usia tidak produktif. Jika nilai DR dibedakan menurut jenis kelamin, maka rasio ketergantungan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Nilai DR ini termasuk dalam Kategori berat, seperti dijelaskan Pollard *et al.* (1974) bahwa nilai DR 0 – 30 termasuk kategori ringan, 31 – 60 termasuk kategori sedang dan $>$ 60 termasuk kategori berat.

Rasio ketergantungan penduduk yang dikategorikan berat dan struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan pertanian, maka ke depan kebijakan ketenagakerjaan harus bertumpuh pada upaya peningkatan nilai tambah. Bahkan, untuk sektor pertanian yang merupakan matapencaharian penduduk terbesar harus diindustrialisasikan melalui pengembangan agroindustri, sehingga ada keseimbangan beban kerja antara sektor primer, sekunder dan sektor tersier.

2.6. Sarana dan Prasarana

2.6.1. Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Musi Rawas berjumlah 457 unit, yang terdiri dari Sekolah Dasar (SDN/S) berjumlah 410 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMPN/S) berjumlah 36 unit dan Sekolah Menengah Umum (SMUN/S) berjumlah 11 unit. Tabel 2.15 menyajikan jumlah sekolah menurut jenjang.

Tabel 2.15
Jumlah Sekolah Dirinci Per Kecamatan Dalam
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Sekolah
		SDN/S	SMPN/S	SMUN/S	
1.	Rawas Ulu	24	2	1	27
2.	Rupit	23	2	1	26
3.	BKL Ulu Terawas	38	2	0	40
4.	Muara Beliti	28	2	2	32
5.	Tugumulyo	30	2	1	33
6.	Jayaloka	24	3	1	28
7.	Muara Kelingi	51	3	1	55
8.	Muara Lakitan	30	3	1	34
9.	Megang Sakti	32	4	1	37
10.	Rawas Ilir	20	2	1	23
11.	Karang Dapo	11	1	0	12
12.	Karang Jaya	18	2	0	20
13.	Purwodadi	13	2	0	15
14.	BTS Ulu	26	2	1	29
15.	Nibung	16	2	0	18
16.	Selangit	16	1	0	17
17.	Ulu Rawas	10	1	0	11
Jumlah		410	36	11	457

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Musi Rawas, 2004

Pada Tabel 2.15 menunjukkan bahwa, secara umum semua kecamatan telah dilengkapi oleh sarana pendidikan SD dan SMP, terkecuali jenjang pendidikan SMU. Pada jenjang pendidikan SMU hanya beberapa kecamatan yang telah memiliki SMU, sehingga sebagian besar, yaitu kecamatan BKL Terawas, Karang Dapo, Karang Jaya, Purwodadi, Nibung, Selangit dan Kecamatan Ulu Rawas belum mempunyai fasilitas gedung SMU. Karena itu, untuk meningkatkan APK, APM dan derajat pendidikan secara keseluruhan diperlukan pembangunan gedung SMU, selain perbaikan dan pengembangan fasilitas Sekolah yang telah ada. Apalagi kalau dihubungkan dengan permasalahan rendahnya APK dan APM tingkat SLTA, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai konsekuensi logis dari kebijakan ini, maka kebijakan kepegawaian lima tahun ke depan harus lebih diarahkan pada penambahan tenaga pendidik dan kependidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

2.6.2. Kesehatan

Ditinjau dari ketersediaan sarana kesehatan, puskesmas pembantu merupakan sarana kesehatan yang memiliki jumlah relatif besar dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Jumlah seluruh sarana kesehatan 381 unit, terdiri dari Rumah Sakit 1 unit, Puskesmas 22 unit, Pustu 143 unit dan Polindes 214 unit. Untuk lebih jelasnya jumlah sarana kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Jumlah Sarana Kesehatan Dirinci Per Kecamatan Dalam

No.	Kecamatan	Sarana Kesehatan					Jumlah
		Rumah Sakit	Puskesmas	PUSTU	POLINDES	Klinik Bersalin	
1.	Rawas Ulu	0	1	7	13	0	22
2.	Rupit	1	0	6	12	1	22
3.	BKL Ulu Terawas	0	2	10	17	0	30
4.	Muara Beliti	0	1	8	14	0	24
5.	Tugumulyo	0	2	8	13	0	23
6.	Jayaloka	0	2	8	18	0	28
7.	Muara Kelingi	0	2	7	22	0	41
8.	Muara Lakitan	0	1	11	15	0	26
9.	Megang Sakti	0	2	12	11	0	23
10.	Rawas Ilir	0	2	8	11	0	22
11.	Karang Dapo	0	1	5	5	0	12
12.	Karang Jaya	0	1	9	12	0	23
13.	Purwodadi	0	1	5	11	0	17
14.	BTS Ulu	0	1	3	18	0	27
15.	Nibung	0	1	7	7	0	17
16.	Selangit	0	1	6	8	0	14
17.	Ulu Rawas	0	1	2	7	0	10
Jumlah		1	22	143	214	1	381

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas, 2004

Secara umum Tabel 2.16 menunjukkan bahwa sarana kesehatan yang ketersediaannya masih kurang adalah rumah sakit dan klinik bersalin. Ini jika dihubungkan dengan rendahnya derajat kesehatan seperti yang dijelaskan sebelumnya, merupakan permasalahan. Artinya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan pembangunan rumah sakit atau sekurangnya PUSKEMAS rawat inap di lima distrik agropolitan (Simpang Semambang, Simpang Prabumulih, Simpang Terawas, Simpang Nibung dan Megang Sakti) dan di pusat agropolitan (Muara Beliti). Selain itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan, maka kebijakan kepegawaian lima tahun ke depan harus diarahkan pada penambahan petugas medis/paramedis yang disertai dengan peningkatan kemampuannya.

2.6.3. Peribadatan

Ketersediaan sarana peribadatan di Kabupaten Musi Rawas didominasi oleh 559 unit masjid dan 435 unit langgar, hal ini di indikasikan karena sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Untuk lebih jelasnya ketersediaan sarana peribadatan disajikan pada Tabel 2.17

Tabel 2.17
Jumlah Sarana Peribadatan Dirinci Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Sarana Peribadatan							Jumlah
		Masjid	Langgar	Mushola	Gereja	Kapel	Vihara	Pura	
1.	Rawas Ulu	33	4	1	2	-	-	-	40
2.	Rupit	20	10	2	1	-	-	-	33
3.	BKL Ulu Terawas	57	46	3	2	-	-	-	108
4.	Muara Beliti	22	12	-	2	-	-	-	36
5.	Tugumulyo	37	66	1	5	-	-	-	109
6.	Jayaloka	33	52	1	4	-	-	-	90
7.	Muara Kelingi	57	78	1	3	-	-	-	139
8.	Muara Lakitan	37	23	-	-	-	-	-	60
9.	Megang Sakti	66	35	-	3	-	1	2	107
10.	Rawas Ilir	11	4	1	-	-	-	-	16
11.	Karang Dapo	16	18	1	-	-	-	-	25
12.	Karang Jaya	19	17	-	-	-	-	-	36
13.	Purwodadi	23	6	-	1	-	-	7	37
14.	BTS Ulu	57	61	1	-	-	-	-	119
15.	Nibung	24	3	-	1	-	-	-	28
16.	Selangit	22	-	-	-	-	-	-	22
17.	Ulu Rawas	25	6	-	-	-	-	-	31
Jumlah		559	435	12	24	-	1	9	1.036

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Musi Rawas, 2003

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa semua sarana peribadatan menurut pemeluknya, tersedia di daerah ini. Artinya, bahwa daerah ini mempunyai keragaman dalam agama, dan Islam merupakan agama terbesar berdasarkan jumlah pemeluknya. Ke depan hal yang perlu dibangun adalah memelihara kerukunan umat beragama yang sudah baik dan pengembangan pendidikan agama baik pada sekolah umum maupun pada pendidikan non-formal.

2.6.4. Perdagangan dan Jasa

Posisi strategis sebagai Kabupaten Musi Rawas yang terletak di antara tiga Provinsi (Provinsi Sumater Selatan, Jambi dan Provinsi Bengkulu) secara signifikan berpengaruh terhadap struktur

perekonomian daerah ini. Artinya, sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan.

Gambaran kondisi eksisting sarana perdagangan dan jasa Kabupaten Musi Rawas saat ini sebagian besar masih berupa toko dan kios, di antaranya, delapan unit pasar yang terdiri dari Pasar B Srikaton, Pasar O Mangun Harjo, Pasar Megang Sakti, Pasar Muara Rupit, Pasar Surulangun Rawas, Pasar Muara Kelingi dan Pasar Air Beliti. Di dalam pasar-pasar ini disediakan kios dan los sebagai penunjang sarana perdagangan. Jumlah Kios dan Los dimaksud masing 426 unit dan 423 unit. Untuk lebih jelasnya data disajikan pada Tabel 2.18

Tabel 2.18.
Jumlah Pasar, Kios dan Los Pasar

No	Nama Pasar	Kecamatan	Kios	Los (M ²)
1	Pasar B Srikaton	Tugumulyo	136	164
2	Pasar O Mangun Harjo	Purwodadi	20	10
3	Pasar Megang Sakti	Megang Sakti	200	249
4	Pasar Muara Rupit	Rupit	39	0
5	Pasar Surulangun Rawas	Rawas Ulu	31	0
6	Pasar Muara Kelingi	Muara Kelingi	0	0
Jumlah			426	423

Sumber : Dinas Perindagkop, Kabupaten Musi Rawas, 2003

2.6.5. Pemerintahan

Saat ini Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintahan masih berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2001 Tanggal 4 Januari 2001. SOTK tersebut terdiri dari unsur staf yaitu Setda, Setwan, dan Kecamatan/Kelurahan, unsur pelaksana yang terdiri dari Dinas-dinas pemerintah, unsur pendukung yang berupa Badan, Kantor dan lembaga lainnya.

Sampai saat ini, untuk menjalankan tugas pemerintahan semua fasilitas berupa gedung/kantor masih berada di Kota Lubuklinggau. Kecuali, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, dan lain-lain yang prinsipnya adalah menangani segala keperluan pelayanan pemerintahan letaknya tersebar di berbagai kecamatan dan desa.

2.6.6. Transportasi

Sebagai daerah transito, sektor perhubungan merupakan sektor yang sangat menunjang perekonomian daerah. Di Kabupaten

Musi Rawas sarana transportasi sangat beragam, di antaranya, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandeng, kereta tempel, kendaraan khusus. Jumlah total kendaraan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 berjumlah 2.890 unit kendaraan. Berdasarkan data yang ada diperoleh diketahui bahwa jumlah kendaraan pribadi merupakan kendaraan yang paling banyak terdapat di Kabupaten Musi Rawas, yaitu berjumlah 2.369 unit, sedangkan untuk jenis kendaraan terbanyak yaitu mobil barang yang berjumlah 2.632 unit. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada Tabel 2.19

Tabel 2.19
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji Menurut Jenis Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Umum	Pribadi	Pemerintah	Jumlah
1	Sepeda Motor	0	0	0	0
2	Mobil Penumpang	128	0	0	128
3	Mobil Bus	23	20	0	43
4	Mobil Barang	370	2.262	0	2.632
5	Kereta Gandeng	0	0	0	0
6	Kereta Tempel	0	0	0	0
7	Kendaraan Khusus	0	87	0	87
Jumlah		521	2.369	0	2.890

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas 2003

Prasarana jalan menunjukkan bahwa, panjang jalan yang terdapat di Wilayah Kabupaten Musi Rawas 1.900,96 km. Terdiri dari 246,6 km jalan negara dengan kondisi baik dan beraspal, 200.7 km jalan Provinsi dengan kondisi sebagian besar sedang dan jalan kabupaten sepanjang 1.453,8 km.

Dalam kurun waktu 1998 – 2000, panjang jalan Provinsi dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan yang pesat, yaitu dari 24 Km menjadi 197 Km, sedangkan panjang jalan kabupaten dan negara relatif tetap selama kurun waktu tersebut. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Musi Rawas dapat dikatakan masih memprihatinkan. Indikasinya, masih banyak terdapat jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Untuk lebih jelasnya keadaan jalan di Kabupaten Musi Rawas disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Jumlah Panjang Jalan Menurut Status Jalan

No	Keadaan Jalan	Status Jalan								
		Jalan Negara (km)			Jalan Propinsi (km)			Jalan Kabupaten (km)		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
1.	Jenis Permukaan									
	a. Aspal	183,8	183,8	246,46	184,7	184,7	114,7	718	497,1	459,1
	b. Kerikil	-	-	-	54	-	22	395	387,5	371,5
	c. Tanah	-	-	-	38	-	64	543	426	626,2
	d. Tidak dirinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kondisi Jalan									
	a. Baik	183,8	183,8	246,46	111	111	200,7	344,4	229,9	208,9
	b. Sedang	-	-	-	49	60	-	561,1	147,7	463,2
	c. Rusak	-	-	-	60	53	-	357,5	618	369,9
	d. Rusak berat	-	-	-	53	0	-	393	315	411,8

Sumber : Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas dan UPTD PJ3 Provinsi Sum - Sel, 2005

Selain kerusakan jalan, permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan prasarana dan sarana transportasi adalah jaringan jalan yang ada belum mendukung terbentuknya jaringan perekonomian regional. Sehingga, ke depan untuk membangun jaringan ekonomi regional dalam kesatuan distrik agropolitan diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas jalan yang dapat mengakses hubungan dari dan ke distrik agropolitan, pusat agropolitan dan pusat pemerintahan. Dengan terbentuknya jaringan seperti itu, selain mendukung pengembangan ekonomi daerah, juga mendukung peningkatan pelayanan publik.

2.6.7. Irigasi

Sebagai wilayah agraris, keberadaan jaringan irigasi merupakan prasarana ekonomi yang strategis. Kabupaten Musi Rawas mempunyai banyak sungai besar yang berasal dari TNKS, sehingga ketersediaan airnya masih relatif stabil. Namun demikian, pemanfaatannya untuk irigasi masih belum maksimal, hal ini disebabkan besarnya investasi yang harus disediakan untuk pembangunan suatu bendungan atau jaringan irigasi. Untuk lebih jelasnya Jaringan irigasi yang dimiliki Kabupaten Musi Rawas sampai dengan tahun 2004 disajikan pada Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21
Jaringan Irigasi dan Luas Areal Layanan

No.	Daerah Irigasi	Luas Areal Layanan	Jaringan		
			Saluran (Km)	Bangunan (Unit)	Jalan Inspeksi (Km)
	DI. Kelingi Tugumulyo	10.163	181,90	189	27,00
	DI. Air Gegas	2.678	26,50	98	0
	DI. Air Salan	1.732	18,00	29	12,30
	DI. Air Deras I	1.461	29,00	42	9,00
	DI. Air Tupak	778	36,00	37	15,00
	DI. Megang Tikip	912	18,00	46	5,00
	DI. Air Deras II	926	18,40	37	3,00
	DI. Air Dangku	200	2,00	9	0
	DI. Air Ketuan Kecil/B. Agung	593	8,00	26	8,00
	DI. Air Merung	579	10,00	54	0
	DI. Air Sukamana	314	7,00	6	0
	DI. Sri Kemuning	360	3,00	7	0
	DI. Sukaraya	246	2,00	10	0
	DI. Sukarame	200	2,00	4	0
	DI. Sukakarya	250	2,00	3	0
	DI. Jajaran Baru	360	3,00	4	0
	DI. Kasgoro	160	2,00	6	0
	DI. Air Nitap	130	4,00	23	0
	DI. Padu Raksa	150	2,00	5	0
	DI. Tebat Sech	200	2,00	9	0
	DI. BTS Ulu SP. III	300	4,50	1	0
	DI. Air Kambil	200	1,50	3	0
Jumlah		22.892		648	79,30

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa di Kabupaten Musi Rawas masih berpotensi dikembangkan irigasi skala besar seperti bendungan Sungai Rawas. Adanya rencana ke depan untuk memanfaatkan potensi Sungai Rawas ditambah dengan pembangunan bendungan Sungai Lakitan yang sedang dibangun sekarang ini, akan menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan. Namun demikian, karena permasalahan dana investasi yang cukup besar, maka diperlukan sumber dana dari APBN atau mengundang investor asing.

2.6.8. Air Bersih

Pada umumnya kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas telah mendapat pelayanan air minum/air bersih dari BPAM/PDAM Musi Rawas. Banyaknya debit air minum yang disalurkan BPAM kepada pelanggan tercatat sebesar 2.391.385 m³. Sebagian besar debit tersebut untuk pelanggan rumah tangga yang banyaknya 1.964.411 m³ atau 82,15%. Sampai saat ini PDAM Musi Rawas masih dibawah urusan PU Cipta Karya. Namun demikian, ke depan perlu ada perluasan jaringan penyediaan air bersih yang dapat diakses masyarakat yang lebih luas.

2.6.9. Listrik

Fasilitas tenaga listrik yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas berasal dari Gardu Induk (GI) Lahat dan GI Curup, PLTD Lubuk Linggau dan Listrik yang berasal dari pembangkit sendiri, yaitu sub-ranting Muara Rupit, sub ranting Bingin Teluk, sub ranting Sungai Rawas. Dari Jumlah kapasitas listrik yang tersalurkan sebesar 4.091.875 Kwh yang terpasang ke pelanggan sebesar 3.537.242 Kwh. Dengan demikian kapasitas yang tersalurkan masih tersisa 444.633 Kwh. Berdasarkan informasi PLN Ranting Lubuk Linggau, dalam waktu dekat ini sedang diusahakan langsung menginduk dengan Tanjung Enim (Interkoneksi). Untuk lebih jelasnya tenaga listrik dan jaringan listrik disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22.
Tenaga Listrik yang Disalurkan di Kabupaten Musi Rawas

No.	Sumber Pembangkit Listrik	Jumlah (Kwh)
1.	GI. Lahat	730.000
2.	GI. Curup	3.049.822
3.	PLTD Lubuk Linggau	201.480
4.	Muara Rupit	49.028
5.	Bingin Teluk S. Rawas	62.100
Jumlah		4.092.430
Disalurkan		4.091.975

Sumber : PLN Ranting Lubuk Linggau, 2003

Walaupun masih ada kapasitas yang belum terpasang, namun akses fasilitas tenaga listrik belum menyebar secara merata. Karena itu, lima tahun ke depan harus ada perencanaan pemerataan persebaran tenaga listrik. Jika dilihat dari potensi tambang seperti dijelaskan sebelumnya, maka dengan ditemukan tambang batu bara di Sungai Malam, daerah ini dapat mandiri dalam penyediaan listrik dan bahkan dapat menyuplai Jawa – Bali.

2.6.10. Telekomunikasi

Sarana dan prasarana telekomunikasi yang tersedia cukup lengkap seperti telepon seluler, wartel, kiospon, warnet yang kesemuanya melalui saluran telepon otomatis dapat menghubungkan keluar daerah. Namun sampai saat ini, baru 2 kecamatan yang telah terhubung dengan STO, yaitu Tugumulyo dan Rupit . Kecamatan yang lain masih belum mendapat jaringan telepon. Tetapi jaringan celluler telah menjangkau beberapa kecamatan seperti Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Data Fastel Per Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Area
Pelayanan Lubuk Linggau

No.	Kecamatan	Jumlah SST	FASTELEKSISTING	Operator Seluler
1.	Purwodadi	2 SST	Belum Ada	Telkomsel/Satelindo/XL
2.	BKL. Ulu	-	Belum Ada	XL
3.	Selangit	-	Belum Ada	Telkomsel/XL
4.	Tugumulyo	835 SST	STO Tugumulyo	Telkomsel/Satelindo/XL
5.	Karang Jaya	1 SST	Belum Ada	Satelindo
6.	Rupit	234 SST	STO RUPIT	Satelindo
7.	Karang Dapo	2 SST	Belum Ada	Satelindo
8.	Megang Sakti	6 SST	Belum Ada	Belum Ada
9.	Muara Lakitan	4 SST	Belum Ada	Telkomsel/Satelindo/XL
10.	Muara Kelingi	5 SST	Belum Ada	Telkomsel/Satelindo/XL
11.	BTS. Ulu	1 SST	Belum Ada	Belum Ada
12.	Jayaloka	4 SST	Belum Ada	Satelindo
13.	Muara Beliti	11 SST	Belum Ada	Telkomsel/Satelindo/XL
14.	Rawas Ulu	-	Belum Ada	Satelindo
15.	Ulu Rawas	-	Belum Ada	Belum Ada
16.	Nibung	-	Belum Ada	Satelindo
17.	Rawas Ilir	-	Belum Ada	Belum Ada

Sumber : PT Telkom Cabang Lubuklinggau, 2005

2.7. Administrasi Pemerintahan

Sejak Tahun 2000 Pemerintah Kabuapten Musi Rawas telah melakukan beberapa kali perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintahan. SOTK yang masih berlaku sampai saat ini adalah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang SOTK Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahkan:
 - a. Asisten Tata Praja.
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Asisten Administrasi
2. Masing-masing sebagaimana dimaksud adalah
 - 1.) Asisten Tata Praja membawahi:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Tata Pemerintahan.
 - Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa

- Sub Bagian Perkotaan dan Pengembangan Lembaga Desa.
 - Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 - b. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan.
 - Sub Bagian Bantuan Hukum.
 - Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - c. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
 - Sub Bagian Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perpustakaan.
 - Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.
 - d. Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.
 - Sub Bagian Pengevaluasian dan Pengendalian.
 - Sub Bagian Pemantauan dan Pemulihan.
- 2.) Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahi:
- a. Bagian Ekonomi, terdiri dari:
 - Sub Bagian Sarana Perekonomian.
 - Sub Bagian Produksi Daerah
 - Sub Bagian Pengelolaan Dana Bergulir.
 - b. Bagian Pembangunan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Penyusunan Program.
 - Sub Bagian Pengendalian.
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Kesejahteraan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.
 - Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.
- 3.) Asisten Administrasi membawahkan:
- a. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Anggaran Rutin.
 - Sub Bagian Anggaran Pembangunan
 - Sub Bagian Pembukuan.
 - Sub Bagian Perbendaharaan Rutin.
 - Sub Bagian Perbendaharaan Pembangunan
 - Sub Bagian Anggaran Verifikasi dan Kas.

- b. Bagian Umum, terdiri dari:
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Sub Bagian Rumah Tangga.
 - Sub Bagian Protokol.
 - Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - Sub Bagian Kearsipan.
 - c. Bagian Perlengkapan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Analisa Kebutuhan.
 - Sub Bagian Pengadaan.
 - Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
 - Sub Bagian Aset Daerah.
 - d. Bagian Komunikasi dan Informasi, terdiri dari:
 - Sub Bagian Kehumasan.
 - Sub Bagian Media Penerangan.
 - Sub Bagian Penerangan Langsung.
 - Sub Bagian Program dan Pengelolaan Data Kehumasan.
- 4.) Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan SOTK Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas, dengan Perda ini dibentuk 5 Badan, 17 Dinas dan 3 Kantor, sebagai berikut:

1. Bappeda
2. BKD
3. Badan Pengawas
4. BKB & PKS
5. Badan Rumah Sakit Umum Daerah
6. Dinas Pertanian.
7. Dinas Perkebunan.
8. Dinas Peternakan dan Perikanan.
9. Dinas Kehutanan.
10. Dinas Pertambangan dan Energi.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
12. Dinas Perhubungan.
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
14. Dinas Pendidikan Nasional.
15. Dinas Kesehatan.
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
17. Dinas Kependudukan dan Capil
18. Dinas Pendapatan Daerah.

19. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
20. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
21. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
22. Dinas Kesejahteraan Sosial.
23. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
24. Kantor Sat Pol PP
25. Kantor Kesbang Linmas

2.8. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.8.1. Pendapatan Daerah

Salah satu akibat dari berlakunya desentralisasi fiskal sejak tahun 2001 adalah meningkatnya penerimaan Kabupaten Musi Rawas yang sangat signifikan dibanding dengan kondisi sebelum desentralisasi. Meningkatnya jumlah penerimaan daerah tersebut pada dasarnya disumbang oleh kenaikan drastis pada Dana Perimbangan dalam bentuk Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan lain yang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Secara rinci perkembangan komposisi komponen dalam dana perimbangan disajikan pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Distribusi Komponen Pendapatan Tahun 2002-2005

No	Sumber Pendapatan	2003 (Rp.000)	%	2004 (Rp.000)	%	2005 (Rp.000)	%
1.	DAK	1.060.794,00	0,4	12.200.000,00	3,7	2.569.000,00	0,8
2.	DAU	166.787.500,00	60,4	187.256.000,00	56,4	201.780.000,00	66,1
3.	Bagi Hasil Pajak	45.031.514,00	16,3	62.098.357,00	18,7	36.071.019,00	11,8
4.	Bagi Hasil Non Pajak	53.125.284,00	19,2	58.628.370,00	17,6	53.077.447,00	17,4
5.	PAD	10.208.091,00	3,7	11.938.338,90	3,6	12.001.807,00	3,9
		276.213.183,00	100,00		100,0	305.499.273,00	100,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas 2005

Tabel 2.24 menunjukkan bahwa dalam struktur pendapatan, PAD hanya memberikan kontribusi antara 3,2 % - 3,9 %. Ini artinya bahwa daerah masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat.

Bertitik tolak dari kontribusi PAD dalam struktur pendapatan, maka untuk mendorong daya saing otonomi daerah diperlukan upaya-upaya akselerasi peningkatan PAD dalam struktur pendapatan daerah. Upaya ke arah itu, jika dilihat dari sumberdaya alam, termasuk posisi strategis wilayah secara logis dapat dilakukan. Satu di antaranya adalah menjadikan daerah ini sebagai daerah jasa dengan membangun

fasilitas perdagangan seperti: terminal agribisnis, terminal peti kemas, pusat perdagangan, dan prasarana/sarana transportasi.

2.8.2. Belanja

Pada kelompok Belanja, dalam sistem pembukuan keuangan saat ini dibagi menjadi Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Dalam komponen Belanja Aparatur terdiri Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasional & Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal. Demikian juga dalam komponen Belanja Pelayanan Publik dibagi beberapa sub komponen, terdiri dari Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasi & Pemeliharaan (BOP), Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka.

2.8.2.1. Belanja Aparatur

Dalam kelompok Belanja Aparatur terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan pada Belanja Administrasi Umum (BAU), diikuti oleh Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP), dan Belanja Modal. BAU atau dulu dikenal dengan nama belanja Rutin menunjukkan kecenderungan meningkat, baik secara nominal maupun proporsional terhadap total belanja daerah, yaitu sebesar Rp 187.841.977.800,- pada tahun 2002, meningkat menjadi Rp 231.050.440.313,- pada tahun 2003, dan meningkat menjadi Rp 254.239.357.934,- pada tahun 2004. Tahun 2005 direncanakan akan sebesar Rp 251.628.230.053,-.

Secara umum, sejak dilaksanakannya otonomi daerah tidak hanya wewenang dan tugas dari pemerintah pusat yang diserahkan pada daerah, tetapi juga personil, peralatan dan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Demikian juga likuidasi beberapa Satuan Kerja yang dulunya merupakan instansi vertikal dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, sejak otonomi daerah berangsur-angsur dilimpahkan ke Pemerintah Daerah dan secara otomatis juga membebani BAU yang tidak saja pada belanja pegawai, tetapi juga belanja non pegawai karena mereka membutuhkan biaya/pengeluaran operasional. Pada tahun 2004 BAU sebesar Rp 205.155.682.756,- meningkat menjadi Rp. 213.829.132.500,- pada tahun 2005, sama dengan 53,3% dari total APBD.

2.8.2.2. Belanja Pelayanan Publik

Dalam komponen Belanja Pelayanan Publik dibagi menjadi beberapa sub komponen, terdiri dari BAU, BOP, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Tersangka.

Karena untuk BAU pelayanan publik telah didanai dari kegiatan belanja administrasi umum di setiap SKPD, maka BAU ditiadakan.. Belanja yang terbesar adalah Belanja Modal, yang sebagian besar dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan jembatan serta fasilitas lainnya.

Pada tahun 2002 Belanja Modal Pelayanan Publik sebesar Rp 98.977.535.550,- (33,3% dari total APBD). Kecenderungan peningkatan ini berlanjut pada tahun berikutnya, terutama diperuntukkan pada fungsi-fungsi ekonomi, seperti sektor transportasi, meteorologi dan geofisika. Fungsi dan sub fungsi lain yang mendapatkan porsi cukup besar antara lain fungsi kesehatan, pendidikan dan fungsi ekonomi lainnya.

